



Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dalam Pemutakhiran Data PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Kudus

Ivan Maula Nawa Akbar^{1*}, Muhammad Zaki al Amin², Saekhu³

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo

² Universitas Islam Negeri Walisongo

³ Universitas Islam Negeri Walisongo

*Penulis Korespondensi: nawa.akbar17@gmail.com

Abstract. *The internship program serves as a means for students of the Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Walisongo to apply their academic knowledge in real-world work settings. This study aims to analyze the management of local tax administration during the internship at the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Kudus Regency. The main focus of this study is to evaluate the effectiveness of using the Tax Object Management Information System (SISMIOP) in updating data on the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The operational activities examined include a series of data structuring processes, participation in mass printing preparation, affixing stamps on PBB Tax Due Notices (SPPT), and the distribution of PBB-P2 SPPT to the community. Additionally, this study reviews the implementation of PBB-P2 data updating training and the data input process using other supporting applications such as SIMPATDA and SPOP. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including direct participatory observation in the field and interviews regarding local tax management. The results of the analysis show that administrative digitalization through SISMIOP significantly optimizes time efficiency, accelerates the validation of active tax object data, and minimizes operational recording errors. The use of this system is proven effective in supporting the smooth administration cycle of PBB-P2 at the regional level, although it still requires periodic optimization of network capacity and local server reliability to handle massive data update volumes.*

Keywords: *SISMIOP, Data Updating, PBB-P2, SPPT, BPPKAD of Kudus Regency*

Abstrak. Kegiatan magang merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo untuk menerapkan keilmuan di dunia kerja nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan administrasi perpajakan daerah selama pelaksanaan magang di Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dalam pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Aktivitas operasional yang dikaji mencakup rangkaian proses penataan data, partisipasi dalam persiapan cetak massal, pembubuhan stempel pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, hingga pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB-P2 ke masyarakat. Selain itu, kajian ini juga meninjau pelaksanaan pelatihan pemutakhiran data PBB-P2 serta proses input laporan menggunakan aplikasi penunjang lainnya seperti SIMPATDA dan SPOP. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif langsung di lapangan serta wawancara mengenai pengelolaan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi melalui SISMIOP secara signifikan mampu mengoptimalkan efisiensi waktu, mempercepat validasi data objek pajak aktif, serta meminimalisir kesalahan pencatatan operasional. Penggunaan sistem ini terbukti efektif dalam mendukung kelancaran siklus administrasi PBB-P2 di daerah, meskipun masih memerlukan optimasi berkala pada kapasitas jaringan dan keandalan server lokal guna menghadapi volume pemutakhiran data yang masif.

Kata Kunci: SISMIOP, Pemutakhiran Data, PBB-P2, SPPT, BPPKAD Kabupaten Kudus

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan menggali potensi keuangannya sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Salah satu sumber penerimaan andalan bagi kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam struktur PAD, Pajak Daerah memegang peranan yang sangat vital (Siahaan, 2016). Secara spesifik, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan serta basis penerimaan yang luas bagi Kabupaten Kudus (Mardiasmo, 2019).

Mengingat besarnya potensi penerimaan dari sektor PBB-P2, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, adalah tata kelola administrasi perpajakan yang mencakup jumlah Wajib Pajak yang sangat masif. Proses pendataan, pemutakhiran, hingga penetapan objek dan subjek pajak yang dilakukan secara manual atau konvensional memakan waktu lama, tidak efisien, dan sangat rentan terhadap human error atau kesalahan pencatatan (Agoes & Estralita, 2018). Ketidakakuratan dalam basis data ini pada akhirnya dapat merugikan daerah karena berpotensi menurunkan realisasi penerimaan pajak dan menghambat pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tata kelola administrasi tersebut, pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik menjadi sebuah keharusan (Pratama, 2021). Oleh karena itu, diimplementasikanlah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) guna mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan PBB-P2 secara digital. Penggunaan aplikasi SISMIOP ini diharapkan mampu mempercepat proses pemutakhiran data secara real-time, mempermudah pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara massal, serta meningkatkan validitas data wajib pajak (Wijaya, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji dan mendeskripsikan efektivitas penggunaan sistem SISMIOP dalam proses pemutakhiran data PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Kudus.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami,

mendeskrripsikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai proses, pelaksanaan, serta tingkat efektivitas suatu sistem informasi dalam lingkungan kerja nyata, tanpa menguji hipotesis statistik (Yin, 2018). Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus. Waktu penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang, yang berlangsung dari bulan Januari hingga April 2026.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pelatihan pemutakhiran data PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi SISMIOP, pencetakan massal SPPT, hingga proses pendistribusian SPPT PBB-P2. Selain itu, dilakukan juga wawancara tidak terstruktur terkait Pajak Daerah dengan pihak terkait di lingkungan BPPKAD. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen internal, panduan operasional standar (SOP), buku, serta literatur jurnal terdahulu yang relevan dengan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Gambaran Umum Pengelolaan PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Kudus

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu primadona dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kudus (Siahaan, 2016). Pengelolaannya menuntut ketelitian yang tinggi karena menyangkut hak dan kewajiban masyarakat secara langsung. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, pengelolaan data PBB-P2 kerap menghadapi kendala berupa duplikasi data objek pajak, mutasi subjek pajak yang tidak tercatat, hingga keterlambatan dalam pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). BPPKAD Kabupaten Kudus menyadari bahwa volume data wajib pajak yang terus bertambah setiap tahunnya tidak lagi mumpuni jika hanya ditangani secara konvensional. Oleh karena itu, pengadopsian aplikasi SISMIOP menjadi instrumen krusial dalam mereformasi birokrasi dan administrasi perpajakan daerah.

Mekanisme Pemutakhiran Data Menggunakan Aplikasi SISMIOP

SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang untuk mengelola seluruh tahapan administrasi perpajakan daerah, mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, hingga penagihan perpajakan (Nugroho & Purnomo, 2020). Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, alur pemutakhiran data PBB-P2 menggunakan aplikasi SISMIOP di BPPKAD Kabupaten Kudus sangat sistematis. Tahapan dimulai dengan kegiatan pengumpulan data lapangan atau penerimaan berkas permohonan mutasi dari wajib pajak. Data tersebut kemudian diinput ke dalam sistem SISMIOP oleh operator yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai pemutakhiran data. Sistem ini memungkinkan operator untuk memperbarui elemen data seperti perubahan luas bangunan, perubahan fungsi lahan, atau pemecahan sertifikat tanah secara otomatis. Setelah data diperbarui dalam pangkalan data (database) pusat, sistem akan menghitung ulang estimasi ketetapan pajak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru. Validitas data ini sangat penting sebelum memasuki tahap pencetakan massal SPPT PBB.

Analisis Efektivitas Penggunaan SISMIOP

Penerapan sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan organisasi dengan efisien, tepat waktu, dan akurat (Sutabri, 2012). Analisis efektivitas penerapan SISMIOP di BPPKAD Kabupaten Kudus dapat ditinjau dari beberapa indikator utama:

- Akurasi dan Keandalan Data: Sebelum penggunaan sistem yang terpusat, human error dalam pencatatan sangat rentan terjadi. Dengan SISMIOP, validasi data dilakukan oleh sistem.
- Efisiensi Waktu dan Tenaga: Pencarian data wajib pajak yang sebelumnya mengharuskan pegawai membongkar arsip fisik, kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Distribusi: Kecepatan sistem ini berdampak pada distribusi SPPT yang tepat waktu di awal tahun anggaran, sehingga wajib pajak memiliki rentang waktu yang cukup untuk melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Asis, 2017)

Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan SISMIOP

Meskipun secara keseluruhan dinilai efektif, implementasi SISMIOP di BPPKAD Kudus tidak terlepas dari beberapa kendala teknis dan non-teknis. Pertama, masalah infrastruktur jaringan. Mengingat SISMIOP sangat bergantung pada koneksi internet dan server lokal, tidak jarang terjadi penurunan performa server (downtime) atau system error ketika diakses secara bersamaan pada jam sibuk, terutama mendekati masa jatuh tempo pembayaran atau pada saat pencetakan massal. Kedua, adalah aspek sumber daya manusia (SDM). Pembaruan sistem secara berkala menuntut adaptasi dari para operator. Meskipun telah ada pelatihan, proses adaptasi terhadap User Interface (UI) yang baru terkadang memperlambat ritme kerja operator yang sudah terbiasa dengan versi lama. Selain itu, masih sering dijumpai data lapangan yang belum disinkronkan dengan data di sistem karena kurangnya pelaporan aktif dari wajib pajak terkait perubahan kepemilikan aset.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dalam proses pemutakhiran data PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Kudus telah berjalan secara sangat efektif. Sistem ini berhasil memberikan solusi atas permasalahan administrasi konvensional melalui peningkatan akurasi basis data perpajakan, pemangkasan birokrasi pencarian data, serta percepatan siklus pencetakan hingga distribusi SPPT. Efektivitas sistem ini secara linear berkontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, optimalisasi infrastruktur perangkat keras (server dan jaringan) serta penguatan kapasitas SDM (operator) masih perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar performa sistem tetap stabil, terutama dalam menghadapi beban data yang terus bertambah di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S., & Estralita, T. (2018). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, A., & Purnomo, B. (2020). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Peningkatan Penerimaan PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 112-125.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pratama, R. A. (2021). Peranan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 8(1), 45-58.
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutabri, T. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wardani, D. K., & Asis, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wijaya, H. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Digitalisasi Pelayanan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(3), 210-222.
- Yin, R. K. (2018). Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.